

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT*****ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED REGISTRATION AND REPORTING SYSTEM OF PUBLIC HEALTH CENTER IN HEALTH OFFICE OF PASAMAN BARAT DISTRICT***

Annisa Novita Sary¹, Alfita Dewi², Teddy Kurniawan³
^{1,2,3}Stikes Syedza Sainatika

Email : annisa.novita1011@gmail.com , 082388604966

Abstrak

Puskesmas merupakan suatu lembaga resmi dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar tahun 2017 di Indonesia mencapai 6.110 Puskesmas (62,19%) dengan target yang ditetapkan sebesar 60%. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 122 Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*Indepth Interview*), telaah dokumen dan tabel checklist observasi, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu metode *triangulasi* sumber dan metode. Hasil penelitian dilihat dari komponen input, didapatkan bahwa SDM sudah cukup baik, tetapi masih ada petugas yang rangkap jabatan, dari segi fasilitas masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Sedangkan untuk dana, tidak ada dana khusus. Pada komponen proses, untuk pencatatan petugas masih menggunakan cara manual, meskipun sudah ada yang menggunakan cara komputerisasi. Sedangkan untuk pelaporan sudah cukup baik, tetapi ada beberapa Puskesmas yang terlambat. Komponen output pelaksanaan SP2TP sudah cukup akurat dan relevan, tetapi ada keterlambatan dalam waktu prngiriman laporan dari Puskesmas Pelaksanaan program SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat berjalan dengan baik. Disarankan kepada pihak dinas kesehatan untuk bisa meningkat SDM dan Fasilitas dalam pelaksanaan SP2TP ini. Begitu juga dengan koordinas yang baik antara petugas di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

Kata Kunci : SP2TP, input, proses, output

Abstract

The Puskesmas is an official institution under the auspices of the City Health Office. Public health centers that implement basic health services in 2017 in Indonesia reach 6,110 Puskesmas (62.19%) with a target set at 60%. The purpose of this study was to find out the implementation of integrated Puskesmas recording and reporting systems at the West Pasaman District Health Office in 2019. The type of research used in this study is qualitative, the determination of informants is done by purposive sampling. Data collection is done by in-depth interviews, document review and observation checklist tables, data analysis is done using the content analysis approach. The method used to test the validity of the data is the source and method triangulation method. The results of the study were seen from the input component, it was found that human resources were good enough, but there were



still officers who had multiple positions, in terms of facilities there were still several things that needed to be equipped such as computers and the power of wifi networks. As for funds, there are no special funds. In the process component, for recording officers still use manual methods, even though there are already those who use computerized methods. Whereas the reporting is quite good, although there are still a number of community health centers that are late. The implementation output component is quite accurate and relevant, except that there are still delays in the delivery of reports from public health centers. The implementation of an integrated reporting and recording program for community health centers in the West Pasaman District Health Office is running well. It is recommended to the health office to increase Human Resources and Facilities in implementing this program. Likewise with good coordination between officers in the community health center and at the Health Office.

Keywords : *Implementation of Integrated Health Center Recording and Reporting System Program, input, process, output*

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Kesehatan memberikan dasar-dasar untuk pengambilan keputusan dan memiliki empat fungsi utama: pembuatan data, kompilasi data, analisis dan sintesis data, serta komunikasi dan penggunaan data (Herawati and Purnomo, 2016).

Puskesmas juga merupakan dasar dari data kesehatan. Sehingga diharapkan terciptanya sebuah informasi yang akurat, representative dan realible yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan kesehatan. Salah satu sumber informasi manajemen puskesmas (SIMPUS) di Negara Indonesia adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). Puskesmas merupakan suatu lembaga resmi dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota. Keberadaan Puskesmas sangat dekat dengan tingkat kesehatan dengan mayoritas masyarakat. Hal ini terjadi karena Puskesmas merupakan institusi pelayanan kesehatan yang paling mudah di jangkau oleh masyarakat (Suryani and Solikhah, 2013).

Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar tahun 2017 di Indonesia mencapai 6.110 Puskesmas (62,19%) dengan target yang ditetapkan sebesar 60%. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 122 Puskesmas (Profil Kesehatan 2017, 2012).. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 21 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

dasar dan memiliki sistem informasi Puskesmas yang salah satu programnya yaitu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) (Pusdatin, 2015).

Melalui SP2TP, Puskesmas diwajibkan mengumpulkan data transaksi pelayanan baik pelayanan UKP maupun UKM secara rutin. Melalui berbagai program yang terselenggara, mereka diwajibkan membuat laporan bulanan ke dinas kesehatan melalui format LB1 (laporan bulanan 1) yang berisi data-data pasien selama sebulan dan pencatatan penyakit selama sebulan yang tentunya dalam pembuatan laporan tersebut banyak ditemui kendala seperti kesalahan pencatatan, pencatatan yang ganda sehingga menyebabkan ketidak pastian hasil dari laporan tersebut, selain itu juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman laporan (Kemenkes, 2016).

Dampak dari keterlambatan pelaporan yaitu tidak tersedianya data yang *up to date* yang bisa digunakan sebagai informasi bagi orang yang membutuhkan untuk dijadikan bahan referensi penelitian. Tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka tidak adanya umpan balik di lintas sektor dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi, sampai ke Pusat untuk memberikan informasi apa yang harus di evaluasi kembali untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Selain itu tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat, terdokumentasi wujudnya menjadi



informasi untuk pengambilan keputusan (Sulaeman, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulham Andi Ritonga (2017) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Puskesmas Rantang dengan desain kualitatif, dan pendekatan fenomenologis menunjukkan bahwa SP2TP di Puskesmas Rantang sudah terlaksana meskipun belum optimal, selain itu terdapat beberapa masalah yaitu, belum adanya koordinasi yang baik antara koordinator SP2TP dengan petugas SP2TP, tidak adanya teknologi yang menunjang pelaksanaan program SP2TP, belum adanya dukungan sumber daya manusia khususnya dalam pelaksanaan SP2TP baik secara kualitas dan kuantitas, dan untuk pengiriman laporan umumnya petugas yang bertugas mengantarkan laporan SP2TP ke Dinkes Kota masih menggunakan fasilitas dan sarana milik pribadi, tanpa diberi biaya dana operasional dan masih adanya petugas yang merekap data laporan secara manual dan tidak tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Koordinator SP2TP (Passapari, Sudirman and Nor, 2016).

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pada tiga bulan terakhir (September, Oktober, November) dari 20 Puskesmas yang ada, semuanya terlambat mengantarkan laporan, hanya saja laporan yang sudah siap sebagian dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk Puskesmas yang banyak keterlambatan dalam mengantarkan laporan terdapat terdapat 6 (28,57%) puskesmas yaitu Puskesmas Kajai, Puskesmas Muaro Kiawai, Puskesmas Lembah Binuang, Puskesmas Sasak, Puskesmas Aia Gadang, Puskesmas Silaping pada bulan September dan Oktober, sedangkan untuk bulan November 2018 terdapat lima puskesmas yang terlambat mengirim laporan SP2TP ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat adalah puskesmas Kajai, Puskesmas Muaro Kiawai, Puskesmas Sasak, Puskesmas Aia Gadang, Puskesmas Lembah Binuang dan Puskesmas Silaping (Profil Dinkes Pasbar, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang analisis

pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*, dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 (Notoatmodjo, 2012).

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2018 hingga Maret di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan memilih informan sebanyak tiga belas orang yang dipilih sebagai instrumen kunci secara *purposive sampling* dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*).

Instrumen penelitian kualitatif yang digunakan adalah pedoman wawancara dan *checklist* yang telah disusun secara tertulis sesuai dengan masalah, ditambah dengan menggunakan panduan media *camera digital*, *tape recorder*, dan alat tulis sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan (Bungin, 2011).

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (1 orang), Pemegang Program SP2TP Dinas Kesehatan (2 orang), Kepala Puskesmas (5 orang), dan Pemegang Program SP2TP di Puskesmas (5 orang).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen (Syahrums., 2014).

HASIL

Hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 dinilai dari aspek *input* (SDM, fasilitas dan dana), proses (pencatatan dan pelaporan) dan *output* (ketepatan waktu pelaporan bulanan SP2TP) adalah sebagai berikut:



Input (Masukan)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat memiliki penanggung jawab pelaksana yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Pemegang Program SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Puskesmas dan Pemegang Program SP2TP di Puskesmas. Berikut kutipan wawancaranya yang dilaksanakan pada informan untuk SDM dalam pelaksanaan SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat :

“Di Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab untuk merekap semua laporan SP2TP adalah penanggungjawab program SP2TP, tetapi untuk masing-masing laporan itu diberikan kepada masing-masing program karena kan laporan SP2TP ini terdiri dari berbagai program seperti imunisasi, gizi dan yang lainnya itu direkap masing-masing program baru diserahkan kepada penanggungjawab program SP2TP untuk diperiksa kelengkapannya.” (Informan JI, 42 tahun, wc : 12 Februari 2019).

“Yang bertanggung jawab untuk laporan SP2TP biasanya kalau dipuskesmas ini itu pelaksana SP2TP yang merekap semua laporan yang ada dan menyerahkannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten.” (Informan A, 48 Tahun, wc: 14 Februari 2019).

“Yang bertugas untuk pertanggungjawaban dengan semua laporan SP2TP saya, saya yang rekap, tapi laporan dibuat oleh masing-masing program, bukan kapala puskesmas, kepala puskesmas hanya sebagai penanggungjawab dan coordinator semua laporan adalah KTU di semua puskesmas” (Informan Ys, 53 Tahun, wc:15 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petugas khusus yang merekap laporan bulanan SP2TP dari tiap- tiap ruangan yaitu para petugas atau pemegang

program ditiap-tiap bidang. Mereka yang bertugas untuk membuat rekap atau catatan kegiatan setiap bulan dan rutin dilakukan.

2. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesiapan fasilitas dalam mendukung program SP2TP di Puskesmas masih belum lengkap. Berikut kutipan wawancaranya:

“Selama saya membuat laporan SP2TP tidak ada panduan dalam pembuatannya, hal ini mungkin dikarenakan format yang diberikan tetap sama setiap tahunnya selain itu penambahan laporan juga ada disetiap tahunnya.” (Informan Ad, 46 tahun, wc: 12 Februari 2019).

“Fasilitas yang digunakan dalam program SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat cukup lengkap dengan disediakannya komputer, laptop dan printer. Begitu juga dengan fasilitas lain seperti blanko pembuatan laporan maupun fasilitas kendaraan jika dibutuhkan dalam program SP2TP”. (Informan HN, 56 tahun, wc : 11 Februari 2019).

“Setiap fasilitas yang ada dipuskesmas sekarang sudah mulai di benahi apalagi setelah puskesmas terakreditasi saat ini, seperti sudah tersedianya computer meskipun belum semuanya, maunya harus ada di tiap- tiap ruangan, jaringan internet sudah dipasangkan, tetapi untuk pembuatan dan pengiriman laporan secara online belum terlaksana. (Informan A, 48 Tahun, wc : 14 Februari 2019).

“Tidak ada bank data di sini, datanya disimpan per ruangan. jadi kalo ada pemeriksaan, ditanyakan siapa penanggung jawabnya tiap ruangan, jadi kalo ada pergantian petugas harus dilakukan serah terima terlebih dahulu.” (Informan Ys, 53 tahun, wc: 15 Februari 2019).



Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada buku panduan SP2TP yang tersedia, yang ada hanya format laporan yang didapatkan dari pusat dan pihak Dinkes Kabupaten memberikan ke tiap-tiap Puskesmas. Fasilitas Teknologi yang menunjang seperti unit komputer yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya terpenuhi untuk di wilayah kerja Puskesmas sedangkan untuk dikantor Dinas Kesehatan sudah terpenuhi.

Selain itu semestinya di tiap-tiap ruangan ada unit komputer untuk mempermudah pemegang program untuk menginput data laporannya akan tetapi fakta di setiap Puskesmas kekurangan unit komputer, selain itu fasilitas jaringan *wifi* masih ada yang belum tersedia maksimal di setiap Puskesmas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki ruangan khusus untuk data begitu juga untuk tingkat puskesmas belum memiliki ruangan bank data sebagai ruangan arsip yang terpadu, yang ada hanya ruangan tata usaha sebagai ruang administrasi Puskesmas.

3. Dana

Pendanaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah apakah ada dana khusus yang diberikan dari pihak pemerintah ke tiap-tiap puskesmas untuk melancarkan kegiatan program SP2TP ini. Berikut kutipan wawancaranya:

“Tidak ada dana khusus, karena SP2TP itu kan sudah menjadi pekerjaan rutin, sudah kewajibannya puskesmas melaporkan semua pekerjaan yang dilakukan di puskesmasnya. Jadi seharusnya laporan tetap diberikan tepat pada waktunya dan dana bukan merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan SP2TP ini.” (Informan ZA, 54 Tahun, wc : 16 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara terkait pendanaan program SP2TP dapat disimpulkan bahwa tidak ada pendanaan khusus untuk program SP2TP.

Process (Proses)

1. Pencatatan

Proses pencatatan data merupakan rangkaian kegiatan dalam menunjang ketersediaan data dan informasi. Berikut kutipan hasil wawancara mengenai pencatatan SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat :

“Kalau untuk pencatatan ada yang masih menggunakan cara manual dengan alat tulis seperti pulpen dan blangko kertas yang sudah disediakan, ada juga yang mengetik jika memiliki fasilitas pribadi seperti laptop (Informan A, 47 Tahun, wc: 14 Februari 2019).

“Untuk dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat pencatatan laporan dilakukan dengan fasilitas komputer, saat ini pencatatan masih menggunakan cara manual dilakukan di Puskesmas karena belum tersedia fasilitas komputer yang cukup di Puskesmas.”(Informan HN, 57 Tahun, wc : 11 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, proses pengelolahan data SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat masih dilaksanakan dengan cara sederhana. Meskipun fasilitas komputer tidak tersedia di tiap-tiap ruangan, tetapi petugas atau pemegang di tiap-tiap ruangan menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kelancaran pencatatan SP2TP.

2. Pelaporan

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan mengenai pelaporan SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat :

“Pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 oleh pemegang program SP2TP setelah direkap berdasarkan laporan yang diserahkan oleh pemegang program. Jika ada yang terlambat pemegang program harus mengantarkannya langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten.” (Informan Ys, 53 Tahun, wc : 15 Februari 2019).



Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk pelaporan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh para pemegang program atau kepala seksi masing-masing sedangkan untuk di Puskesmas laporan dibuat oleh masing-masing program kemudian dikumpulkan kepada pelaksana SP2TP selanjutnya Pelaksana SP2TP yang berkewajiban untuk melaporkan laporan bulanan ke Dinkes Kabupaten, untuk yang terlambat mengumpulkan laporan melaporkannya sendiri ke Dinas Kesehatan Kabupaten langsung.

Output (Luaran)

Output yang dinilai dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Pelaksanaan program SP2TP yang dilakukan Berikut kutipan wawancara tentang evaluasi dalam pelaksanaan program SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat :

“Laporan harus dikumpulkan oleh masing-masing pelaksana seperti bidan desa kepada pemegang program pada tanggal 20 paling lambat setiap bulannya. Pemegang program melakukan perekapan dan dikumpulkan kepada pelaksana SP2TP paling lambat tanggal 23 untuk direkap kembali dan dikumpulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten” (Informan A, 47 Tahun, wc : 14 Februari 2019).

“Puskesmas yang terlambat bulan ini Puskesmas Silaping, Kajai, dan Sasak, tapi sebenarnya semuanya terlambat, tapi sudah mengantarkan beberapa laporan lebih dulu, seperti puskesmas Kinali sudah mengantarkan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan masing-masing program tetapi belum mengantarkan laporan penggunaan obat” (Informan Ad, 46 tahun, wc : 12 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang ada beberapa puskesmas yang terlambat dalam pengiriman laporan, untuk mengantisipasi keterlambatan puskesmas mengantarkan terlebih dahulu sebagian laporan yang sudah selesai ke dinas kesehatan.

PEMBAHASAN

A. Input (Masukan)

Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian tentang SDM pada pelaksanaan program SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat sudah mulai baik, tetapi masih memiliki masalah di tingkat Puskesmas, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Petugas yang melaksanakan program SP2TP merupakan tenaga yang fokus melaksanakan kegiatan-kegiatan program pelayanan kesehatan artinya terjadi rangkap jabatan.

Koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana SP2TP kurang baik, belum terpadu. Pelaksana SP2TP melakukan penyampaian atau koordinasi sesekali untuk mengingatkan batasan waktu pelaporan, setelah waktu pelaporan berakhir pelaksana SP2TP tidak mau lagi mengurus laporan bulanan itu dan memerintahkan untuk tiap-tiap pemegang program bertanggung jawab dan melaporkan laporan unitnya langsung ke Dinas Kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, dkk (2015) tentang menyatakan bahwa penanggungjawab SP2TP adalah Kepala Puskesmas dan koordinator atas laporan bulanan adalah kepala tata usaha. Merekap laporan dilakukan oleh kepala tata usaha, dan laporan dibuat oleh masing-masing pemegang program. Dalam penelitian ini juga dinyatakan bahwa tidak ada petugas khusus yang menangani pelaksanaan SP2TP ini.

Sebuah organisasi dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan dan harapan berbeda-beda, dengan tujuan dan harapan tersebut dapat diraih melalui dukungan sumber daya yang dimiliki organisasi, tersedianya sumber daya memadai akan meningkatkan keunggulan dalam



pelaksanaan kegiatan program pada organisasi (WHO, 2008).

Menurut asumsi peneliti Keberhasilan pelaksanaan SP2TP sangat ditentukan oleh faktor manusia yang melaksanakan prosedur sistem informasi. Pengetahuan dan keterampilan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh petugas dalam melaksanakan kegiatan sistem informasi kesehatan. Untuk itu, sudah seharusnya puskesmas perlu dibekali dengan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, agar dapat melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan SP2TP secara efektif dan efisien.

Fasilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pengiriman laporan SP2TP dari Puskesmas ke Dinkes Kabupaten tidak satupun petugas dijumpai menggunakan fasilitas teknologi secara *online*. Melainkan laporan dikirimkan langsung ke Dinkes Kabupaten. Ketersediaan sarana fasilitas pendukung teknologi maupun administrasi dalam menunjang pelaksanaan program SP2TP secara umum belum membawa perubahan dalam menyediakan data SP2TP. Meskipun di puskesmas ada 1 unit komputer, listrik 24 jam, 1 unit printer.

Saat ini, tidak tersedianya petunjuk teknis SP2TP atau tidak adanya buku panduan SP2TP yang dimiliki puskesmas. Kegiatan program SP2TP dilaksanakan hanya mengacu pada contoh yang sudah ada dari pengalaman-pengalaman petugas yang melaksanakan program SP2TP sebelumnya dan dilaksanakan hanya berdasarkan rutinitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, dkk (2015), menyatakan bahwa tidak tersedianya buku panduan SP2TP di Puskesmas dan yang ada hanya format laporan yang sudah didapatkan dari pusat, kurangnya fasilitas komputer dan tidak tersedianya jaringan *wifi*, tidak tersedianya *soft file* didalam *flashdisk* serta tidak adanya ruangan khusus (bank data) untuk penyimpanan laporan serta fasilitas yang digunakan dalam pembuatan laporan masih banyak menggunakan fasilitas pribadi.

Dana

Untuk program ini dibiayai melalui anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhannya, akan tetapi hasil di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya bantuan mengenai anggaran ke Puskesmas yang diteliti. Seharusnya untuk dapat melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan baik, perlu dipenuhi prasyarat tersebut seperti ketersediaan biaya, adanya biaya pelaksanaan kegiatan baik biaya yang bersifat langsung untuk pelaksana kegiatan, biaya tidak langsung yang tetap dan biaya tidak langsung yang sifatnya relatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, dkk (2015) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Kendari, menyatakan bahwa tidak ada pendanaan khusus dalam pelaksanaan program SP2TP di Puskesmas.

Pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja. Biaya merupakan sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan kegiatan. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pelayanan publik. Adanya pendanaan dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai (Mangaro and Setyowati, 2014).

Asumsi peneliti dana juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program. Adanya dana khusus akan lebih membantu pelaksana program dalam membuat laporan yang dibutuhkan dengan lebih baik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggungjawab petugas terhadap pelaporan apa yang dikerjakannya untuk melindungi dirinya secara badan hukum dan memenuhi tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.



B. Process (Proses) Pencatatan

Proses pengelolaan data SP2TP Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat masih dilaksanakandengan cara sederhana. Meskipun fasilitas komputer tidak tersedia di tiap-tiap ruangan, tetapi petugas atau Pemegang Program di tiap-tiap ruangan menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kelancaran pencatatan dan pelaporan SP2TP.

Selain itu ada pula petugas yang masih awam menggunakan komputer, keterbatasan kemampuan komputer petugas ini merupakan salah satu penyebab proses pencatatan dan pelaporan SP2TP tetap dilaksanakan dengan manual atau tulis tangan. Dari hasil penelitian bahwa di Puskesmas ada fasilitas komputer, hanya saja komputer ini hanya 2 unit dan komputer ini berada di ruangan tata usaha dan tempat pendaftaran pasien, yang idealnya unit komputer mestinya ada di setiap ruangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas terhadap pemanfaatan teknologi dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan kepada petugas yang memiliki keterbatasan kemampuan.

Pelaporan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pengiriman laporan dari puskesmas ke dinkes kabupaten secara umum masih belum optimal. Kondisi tersebut dibuktikan dari absensi pelaporan SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat di temukan tanggal penyeteroran laporan bulanan SP2TP Puskesmas tidak tepat waktu atau lewat dari pada tanggal 3 dibulan berjalan yang telah ditetapkan dari peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan permasalahan pengiriman laporan SP2TP diperlukan dukungan berupa *reward* yang dapat dijadikan kompensasi bagi petugas dengan tanggungjawab ganda, dukungan pengadaan fasilitas yang memadai, perbaikan tatalaksana pengiriman laporan. Serta pengadaan tenaga ahli yang khusus bekerja di program SP2TP yang telah mendapatkan pelatihan terlebih

dahulu. Hal ini di harapkan akan meningkatkan pola pengiriman laporan SP2TP puskesmas ke Dinkes Kabupaten Pasaman Barat.

C. Output (Luaran)

Dari hasil dilapangan pada saat penelitian mendapatkan informasi bahwa untuk puskesmas yang paling sering terlambat dalam penyeteroran laporan bulannya adalah Puskesmas Silaping, Kajai, Sasak dan Aia Gadang.

Ketepatan waktu pelaporan adalah penyampaian atau penerimaan menjadi faktor penting dalam arus laporan atas dasar pertimbangan laporan di perlukan untuk bahan pengambilan kebijaksanaan pada saat tertentu atau secara berkala, keterlambatan penyampaian penerimaan laporan akan mengganggu mekanisme pengambilan keputusan. (Herawati and Purnomo, 2016).

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan SP2TP dari aspek sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, yaitu tidak adanya petugas khusus SP2TP mengurus laporan SP2TP Puskesmas, semuanya masih di lakukan oleh para pemegang program di tiap ruangan, belum adanya koordinasi secara terpusat oleh koordinator SP2TP. Fasilitas penunjang di Puskesmas belum memadai dan untuk pendanaan tidak adanya dana khusus yang diberikan kepada petugas SP2TP Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pelaksanaan pencatatan SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yakni pencatatan yang dilakukan oleh pemegang program memang sudah dilakukan, dengan tanpa adanya fasilitas yang memadai petugas tetap melakukan perekapan baik secara manual ataupun menggunakan alat bantu. Sedangkan untuk pelaksanaan pelaporan SP2TP yang dilakukan oleh pemegang program ke kepala ruangan



tata usaha di lakukan dengan semaksimal mungkin dengan pelaporan yang akurat dan relevan.

SARAN

1. Perlu mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan elektronik baik dari Puskesmas ke dinas kesehatan maupun dari dinas kesehatan ke puskesmas agar memudahkan pelaporan data.
2. Perlu dilakukan pelatihan secara terencana dan berkesinambungan pada SDM agar terampil dan profesional dalam pengolahan data SP2TP.
3. Perlunya menyediakan buku panduan SP2TP, fasilitas yang memadai dan pendanaan di puskesmas agar membantu petugas melaksanakan program SP2TP.
4. Perlu adanya ruangan Bank Data yang seharusnya ada disuatu pusat kesehatan masyarakat, yang dijadikan ruangan arsip atau untuk menyimpan semua laporan-laporan mengenai puskesmas secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011) *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana*. doi: 10.1002/jcc.21776.
- Dinkes Pasbar, *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017*. Pasaman Barat ; 2018.
- Herawati, S. and Purnomo, M. A. (2016) 'RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS', *MULTITEK INDONESIA*. doi: 10.24269/mtkind.v10i1.237.
- Kemenkes (2016) 'Sistem Informasi Puskesmas (SIP)', *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. doi: ISSN 2088-270X.
- Mangaro, H. A. and Setyowati, M. (2014) *EVALUASI PENERAPAN SIMPUS UNTUK PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS DI PUSKESMAS PANDANARAN SEMARANG TAHUN 2014, Halaman Pengesahan Artikel Ilmiah*.
- Notoatmodjo, S. (2012) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta., Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Passapari, E., Sudirman and Nor, A. R. A. C. (2016) 'Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (Sp2Tp) Di Puskesmas Kawua Kecamatan Poso Selatan Kabupaten Poso', *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Profil Kesehatan 2017 (2012) 'Data Profile Kesehatan Indonesia 2017', *Ministry of Health Indonesia*. doi: 10.1002/qj.
- Pusdatin (2015) *Infodatin 2015, Kementerian Kesehatan RI*.
- Sulaeman (2011) 'Manajemen Kesehatan: Teori dan Praktek di Puskesmas', *Jogja : UGM Press*.
- Suryani, N. D. and Solikhah, . (2013) 'SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP) DI WILAYAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NTB', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*. doi: 10.12928/kesmas.v7i1.1022.



Syahrum., S. (2014) 'Metodologi Penelitian Kuantitatif', *KOMUNIKASI PENELITIAN KUANTITATIF Program Studi Jurnalistik & Humas.*

Organization.

WHO (2008) 'Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2008-2013', *Geneva: World Health*